

**PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENDAPATAN
PERKAPITA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2013**

**Ida Mentayani
Rusmanto
Lidya Selfia
idamentayani@yahoo.co.id**

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

This research aimed to examine the effect of Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund To Income per capita for allegedly revenue sharing fund, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund affect per capita income in the District / City in the province of South Kalimantan.

The population in this study was 13 (thirteen) District/City in South Kalimantan province from 2010-2013. Based on the criteria for purposive sampling method, obtained a sample of 9 (nine) District/City in the province of South Kalimantan. Data collection techniques done by documentation. Methods of data analysis using simple linear regression model multiple.

The results showed that based on results of ANOVA test to obtain results that simultaneous revenue sharing, General Allocation Fund and Special Allocation Fund effect on per capita income with a significance level of 0.000. Partially indicates that the variable General Allocation Fund no effect on per capita income with a significance level of 0.123, the General Allocation Fund effect on per capita income with a significance level of 0.000, and the Special Allocation Fund has no effect on per capita income with a significance level of 0.117.

Keywords : Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Income Per capita.

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita karena diduga Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010-2013. Berdasarkan kriteria metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 9 (sembilan)

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model regresi linear sederhana dan berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji ANOVA membuktikan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,123, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,117.

Kata Kunci : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Perkapita

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterbitkan dalam rangka menciptakan sistem perimbangan keuangan yang bersifat proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya, Selain itu dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah.

Menurut Solihin & Marhayudi (2002: 210), "Dana Bagi Hasil adalah bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil". Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan

mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga kontribusi yang diberikan Dana Bagi Hasil terhadap pendapatan perkapita dapat meningkat.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.25 tahun 1999 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian, dari 25 % tersebut dibagi lagi menjadi menjadi 90 % untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kotadan, 10 % untuk DAU bagi daerah propinsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, DAU berperan sebagai transfer yang bersifat *block grants*. Salah satu peran DAU adalah untuk pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yaitu dengan menutup celah fiskal

(*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Sehingga kebutuhan DAU suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah.

Menurut Solihin & Marhayudi (2002: 210) “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah”. Dana Alokasi Khusus yang tinggi dapat membiayai kebutuhan khusus daerah seperti sarana dan prasana. Jika prasarana dan sarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka peluang usaha di daerah tersebut. Hal ini dapat membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan perkapita daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang menghitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2000). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian indikator ini tidak secara langsung mencerminkan makna pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Maksud dari makna pertumbuhan

ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat penambahan *output*. Namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya pertambahan penduduk bisa saja ada beberapa masalah seperti tingkat pengangguran yang tinggi, karena persaingan yang semakin ketat di dunia kerja. Indikator lain yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB agar melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya pendapatan perkapita, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat.

Ricky (2009) membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, dana alokasi umum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita. Walidi (2009)

membuktikan secara individual Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Simanullang (2011) membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita serta secara simultan DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Penelitian ini mengacu pada penelitian Simanullang (2011). Adapun persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan dependen, namun Perbedaan penelitian ini terletak pada tahun penelitiannya, populasi penelitian, dan obyek penelitiannya. Irianto N.Manullang meneliti tahun 2004-2009 dengan delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sedangkan penulis meneliti tahun 2010-2013 dengan tiga

belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perekonomian pada Provinsi Kalimantan Selatan yang diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, menunjukkan perkembangan yang terus meningkat selama tahun 2010-2013. Pada tahun 2010 PDRB atas harga dasar berlaku sebesar 21% sedangkan tahun 2011 sebesar 24%, dari tahun 2010-2011 menggambarkan kenaikan sebesar 3%, dan untuk tahun 2012 PDRB atas harga dasar berlaku sebesar 26%, dari tahun 2011-2012 menggambarkan kenaikan 2%, sedangkan tahun 2013 PDRB atas harga dasar berlaku sebesar 29%, dari tahun 2012-2013 meningkat 3%. Sehingga peningkatan selama tahun 2010-2013 sebesar 8%. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010-2013 disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : www.kalsel.bps.go.id (2014)

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

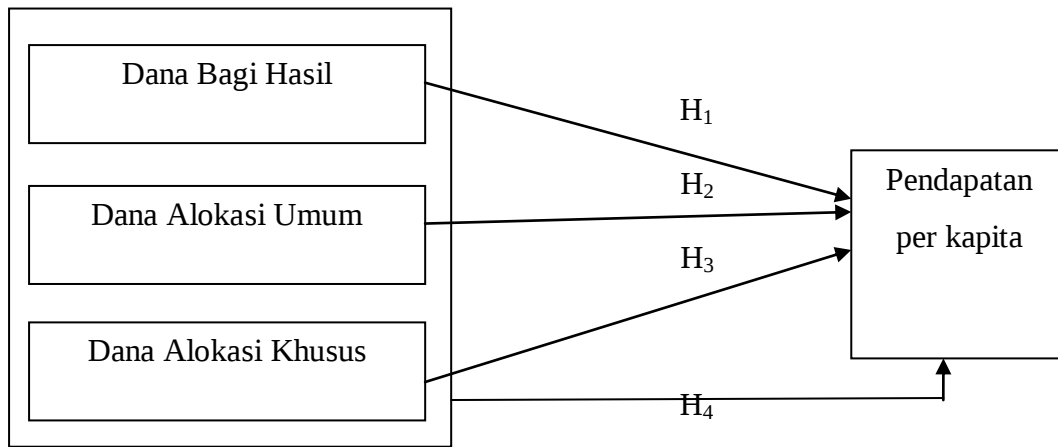
1. Membuktikan secara empiris Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013.
2. Membuktikan secara empiris Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013.
3. Membuktikan secara empiris Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

- H1 : Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan perkapita
- H2 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan perkapita.
- H3 : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan perkapita
- H4 : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita.

Model kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. Model Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang merupakan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan (kausalitas) antar variabel, melalui pengujian hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Perkapita (Y) berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah selama satu tahun. Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai total pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Dalam penelitian ini pendapatan per kapita diukur berdasarkan jumlah pendapatan daerah kabupaten/kota (PDRB) dibagi dengan

jumlah penduduk daerah Kabupaten/Kota dan merupakan proksi data pertumbuhan ekonomi yang bisa dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Variabel independen dalam penelitian, antara lain : 1). Dana Bagi Hasil (X1). Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari pajak bumi bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), PPh perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam yang berasal dari minyak bumi, gas

alam, pertambangan umum, panas bumi, kehutanan dan perikanan. 2). Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU terdiri dari DAU provinsi dan DAU

kabupaten / kota. 3). Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak tiga belas Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banjar
2	Kabupaten Barito Kuala
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara
6	Kabupaten Kota Baru
7	Kabupaten Tabalong
8	Kabupaten Tanah Laut
9	Kabupaten Tapin
10	Kota Banjarbaru
11	Kota Banjarmasin
12	Kabupaten Balangan
13	Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (2014) (data diolah)

Pemilihan sampel yang akan diuji pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Wahyu, 2013: 129). Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terinci di www.djpk.depkeu.go.id dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan memiliki kelengkapan data selama tahun pengamatan.

2. Pendapatan per kapita Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terinci di Badan Pusat Statistik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan memiliki kelengkapan data selama tahun pengamatan.

Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian antara lain : Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terinci di www.djpk.depkeu.go.id dan Pendapatan perkapita Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu

mengumpulkan data laporan realisasi APBD dan Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta daftar pustaka yang relevan.

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak *SPSS 16.0 For Windows*. Sebelum melakukan analisis regresi maka pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis meliputi :

1. Uji Parsial (Uji t) untuk menguji pengaruh variabel independen (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) terhadap variabel dependen (Pendapatan Perkapita) secara parsial melalui analisis regresi linier sederhana. Tingkat kesalahan dalam penelitian ini sebesar 0,05 kriteria pengujian, jika nilai signifikansi variabel independen lebih kecil dari 0,05 secara parsial maka H_a diterima atau H_0 ditolak.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) terhadap variabel dependen (Pendapatan Perkapita) secara

simultan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Tingkat kesalahan dalam penelitian ini sebesar 0,05 kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 secara simultan maka H_0 diterima atau H_0 ditolak.

3. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu membandingkan besarnya nilai koefisien determinan. Jika R^2 semakin besar mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini berjumlah 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2010-2013. Pemilihan sampel secara *purposive sampling*, diperoleh 9 kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel. Berikut ini hasil *output* statistik dari seluruh data yang digunakan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DBH	36	77.444	383.750	1.82994E2	83.235511
DAU	36	245.652	547.025	3.76181E2	86.026687
DAK	36	2.535	74.922	3.33121E1	17.808592
PPKT	36	1.57E6	1.44E7	6.1869E6	3.79330E6
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Output Statistik SPSS

Analisis statistik deskriptif dari variabel *Dana Bagi Hasil (DBH)* menunjukkan bahwa selama periode penelitian untuk nilai

terendahnya sebesar 77,444 yang menunjukkan nilai terendah dari DBH selama tahun pengamatan, yang dimiliki oleh Kabupaten

Barito Kuala pada tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi DBH yaitu sebesar 383,750. Adapun nilai tertinggi dari DBH selama tahun pengamatan, dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2012. Nilai rata-rata (*Mean*) DBH secara keseluruhan dari 9 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 182,99361, artinya bahwa setiap tahunnya selalu menghasilkan nilai DBH positif. Nilai standar deviasi DBH sebesar 83,235511 menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, kondisi DBH kabupaten/kota sampel sangat berfluktuasi, rata-rata jarak antara kabupaten/kota yang memiliki transfer DBH yang tinggi dan positif dari pusat cukup jauh dengan rata-rata jarak antara kabupaten/kota yang memiliki transfer DBH yang sangat rendah dari pusat.

Rata-rata *Dana Alokasi Umum (DAU)* kabupaten/kota sampel pada pengamatan adalah 376,18150. Nilai DAU tertinggi selama tahun pengamatan adalah DAU Kota Banjarmasin pada

tahun 2012 yaitu sebesar 547,025 dan nilai DAU terendah selama tahun pengamatan adalah DAU Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2010 yaitu sebesar 245,652. Nilai standar deviasi sebesar 86,026687 menunjukkan selama tahun pengamatan, kondisi DAU kabupaten/kota sampel sangat berfluktuasi, rata-rata jarak antara kabupaten/kota yang memiliki transfer DAU yang tinggi dan positif dari pusat cukup jauh dengan rata-rata jarak antara kabupaten/kota yang memiliki transfer DAU yang sangat rendah dari pusat.

Rata-rata *Dana Alokasi Khusus (DAK)* kabupaten/kota sampel pada pengamatan adalah 33,31206. Nilai DAK tertinggi selama tahun pengamatan adalah DAK kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 yaitu sebesar 74,922 dan nilai DAK terendah selama tahun pengamatan adalah DAK Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,535. Nilai standar deviasi sebesar 17,808592 menunjukkan selama tahun pengamatan, kondisi

DAK kabupaten/kota sampel sangat berfluktuasi, rata-rata jarak antara kabupaten/kota yang memiliki transfer DAK yang tinggi dan positif dari pusat cukup jauh dengan rata-rata jarak antara kabupaten/kota yang memiliki transfer DAK yang sangat rendah dari pusat.

Rata-rata untuk *Pendapatan Perkapita (PPKT)* kabupaten/kota yang menjadi sampel selama periode pengamatan adalah sebesar 6186910,04. Pendapatan perkapita terendah selama periode pengamatan adalah Kabupaten

Hulu Sungai Utara pada tahun 2010 yaitu sebesar 1567822,65. Sedangkan Pendapatan Perkapita tertinggi selama periode pengamatan dimiliki oleh Kota Banjarmasin pada tahun 2013 yaitu sebesar 14409454,34. Nilai standar deviasinya adalah 3793295,43 menunjukkan bahwa kondisi Pendapatan Perkapita pada kabupaten/kota sampel selama periode pengamatan sangat berfluktuasi, karena jarak Pendapatan Perkapita terendah dan tertinggi cukup jauh.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Uji Secara Parsial)

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.006E6	1.513E6		2.648	.012
DBH	11919.032	7543.674	.262	1.580	.123

a. Dependent Variable: PPKT

Sumber : *Output Statistik SPSS*

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa variabel DBH tingkat signifikansinya adalah 0,123 yakni lebih besar dari 5% (0,05), maka dapat

disimpulkan bahwa H1 ditolak. Artinya, DBH secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2010-2013. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Simanullang (2011) bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita.

Secara rasional, jika Dana Bagi Hasil meningkat maka pendapatan perkapita juga akan meningkat, karena dengan mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, transfer Dana Bagi Hasil dari pusat ke daerah dapat meningkat, sehingga kontribusi yang diberikan Dana Bagi Hasil terhadap pendapatan perkapita dapat meningkat. Begitu pun sebaliknya, Dana Bagi Hasil yang semakin turun setiap tahunnya tentunya akan diikuti pendapatan perkapita yang semakin turun karena tidak optimalnya potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, transfer Dana Bagi Hasil dari pusat ke daerah menurun. Hal di atas mengindikasikan bahwa secara rasional DBH berpengaruh terhadap pendapatan perkapita,

karena DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan sistem desentralisasi. Semakin tinggi transfer Dana Bagi Hasil maka semakin baik pula pendapatan perkapita masing-masing daerah. Hal ini akan menciptakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Secara rata-rata pendapatan perkapita terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan DBH yang membaik. Hal ini terjadi karena ada beberapa daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomiannya belum tertata dengan baik, selain itu kurangnya

kemampuan sumber daya manusia untuk menggali potensi yang ada dan mengelolanya, sehingga masih belum optimal dalam menggali potensi pajak dan sumber daya alam. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota sebagai sampel dengan data 4

(empat) tahun, hal ini kurang bisa menggambarkan transfer Dana Bagi Hasil kabupaten/kota, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.220E6	1.936E6		-3.213	.003
DAU	32980.264	5019.429	.748	6.571	.000

a. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan variabel DAU tingkat signifikansinya adalah 0,000 yakni lebih kecil dari 5 % (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan perkapita pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanullang (2011) dan Walidi

(2009). yang menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. Secara rasional, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti belanja daerah. Jika Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat, begitu juga pendapatan perkapita. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap pendapatan perkapita.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis 3

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.072E6	1.326E6		6.087	.000
DAK	-56588.171	35217.117	-.266	-1.607	.117

a. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan hasil analisis regresi linear sederhana variabel DAK dengan tingkat signifikansi adalah 0,117 yakni lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga H3 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013. Penelitian ini tidak searah dengan penelitian Simanullang (2011) yang menyatakan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita.

Secara rasional, semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan perkapita. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bertujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah seperti pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih. Adanya pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dan hal ini dapat menarik investor untuk membuka lapangan kerja untuk daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Secara rata-rata pendapatan perkapita terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti

dengan DAK yang membaik. Hal ini terjadi karena masih ada infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai dan kontribusi DAK yang kecil untuk 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun presentase DAK terhadap pendapatan perkapita dari tahun 2010-2013, kontribusi DAK terhadap pendapatan perkapita pada tahun 2010 diperoleh 0,84 %, tahun 2011 sebesar 0,53 %, tahun 2012 sebesar 0,65 % dan tahun 2013 sebesar 0,28 %. Kecilnya nilai DAK karena Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota sebagai sampel dengan data 4 (empat) tahun, hal ini kurang bisa

menggambarkan transfer Dana Alokasi Khusus kabupaten/kota, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Hasil temuan ini didukung hasil penelitian dari Ricky (2009) yang menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita.

Uji Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan menggunakan hipotesis alternatif (H4). H4 berarti diduga Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan perkapita. Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 4

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.089E14	3	1.030E14	16.917	.000 ^a
Residual	1.948E14	32	6.086E12		
Total	5.036E14	35			

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, DBH

b. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS

Berdasarkan uji ANOVA pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa variabel DBH, DAU dan DAK mempunyai tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat

signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_4 diterima. Disimpulkan bahwa variabel DBH, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan perkapita.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.613	.577	2.46698E6	1.622

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, DBH

b. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS

Angka R square (R^2) pada tabel 7 di atas menunjukkan angka 0,613 yang berarti bahwa pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap pendapatan perkapita sebesar 61,3% sedangkan sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013.

2. Secara parsial, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih belum optimal dalam menggali potensi pajak dan sumber daya alam. Secara parsial, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan perkapita

tahun 2010-2013. Hal ini terjadi karena besarnya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat, kemudian Dana Alokasi Umum itu digunakan untuk belanja daerah yang secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan perkapita daerah tersebut. Secara parsial, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2013. Hal ini terjadi karena infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai pada daerah tersebut.

Saran

1. Bagi pemerintah

- a. Pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan cara menggali dan mengembangkannya.
- b. Pemerintah daerah dapat memberikan alokasi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih

guna mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah.

- c. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi Dana Alokasi Khusus kepada daerah dengan fokus terhadap alokasi diutamakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang terkait kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat.

2. Bagi peneliti lainnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah tahun penelitian, agar menghasilkan analisis yang lebih tepat serta akurat.
- b. Analisis dalam penelitian ini baru sebagian kecil dari komponen APBD, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain terkait komponen APBD yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Halim, Abdul, 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli 2007*.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan.
- Simanullang, Irianto N, 2011. *Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Pemerintah Pusat Terhadap Pendapatan Perkapita Delapan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (Tesis)
- Solihin dan Marhayudi, 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah Edisi 1*. Jakarta : ISMEE.
- Walidi, 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (Tesis)
- Wahyu, 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Banjarmasin : STIE Nasional Banjarmasin.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi, 2009. *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. Surabaya: The 3rd National Conference UKWM
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- www.dpk.depkeu.go.id di akses pada tanggal : 17 September 2014 dan 17 Desember 2014
- www.kalsel.bps.go.id di akses pada tanggal : 17 November 2014